

**ANALISIS PENERAPAN STANDAR KETERBUKAAN
INFORMASI PUBLIK PADA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) SEKRETARIAT
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas*



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2026

ABSTRAK

Penerapan standar keterbukaan informasi publik pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat mendapatkan prediket “informatif” dalam beberapa kesempatan. Hal tersebut merupakan pencapaian yang pantas untuk dianalisis bagaimana kemudian hal itu dapat terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat. Penerapan standar keterbukaan informasi publik dipengaruhi oleh berbagai aspek organisasi, meliputi ketersediaan sumber daya, struktur organisasi, mekanisme kerja, serta pelaksanaan tugas yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar keterbukaan informasi publik pada PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat telah berjalan dengan baik. Hal tersebut didukung oleh tersedianya sumber daya manusia yang memadai, sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan informasi, struktur organisasi yang jelas, serta pelaksanaan prosedur pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan implementasi tersebut juga tercermin dari berbagai penghargaan yang diterima PPID Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat sebagai bentuk pengakuan atas kualitas layanan keterbukaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, masih terdapat beberapa catatan kekurangan untuk dioptimalkan agar keterbukaan informasi publik pada PPID DPRD Provinsi Sumatera Barat semakin baik.

Kata Kunci: Organisasi, Interpretasi, Fungsi



ABSTRACT

The implementation of public information disclosure standards at the Information and Documentation Management Officer (PPID) of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Sumatra Province has been recognized with the "Informative" qualification on several occasions. This achievement provides an important basis for examining how such recognition has been attained. This study aims to analyze the implementation of public information disclosure standards at the PPID of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Sumatra Province. The implementation of public information disclosure standards is influenced by various organizational aspects, including the availability of resources, organizational structure, work mechanisms, and the execution of duties in accordance with prevailing laws and regulations. This research employs a qualitative case study approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and were analyzed descriptively. The findings indicate that the implementation of public information disclosure standards at the PPID of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Sumatra Province has been carried out effectively. This is supported by the availability of competent human resources, adequate facilities and infrastructure for information services, a well-defined organizational structure, and service procedures implemented in accordance with applicable regulations. The successful implementation is further reflected in the various awards received by the PPID of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Sumatra Province as recognition of the quality of its public information services. Nevertheless, several areas still require improvement to further optimize the implementation of public information disclosure within the PPID of the Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) of West Sumatra Province.

Keywords: Organization, Interpretation, function

